**KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH**

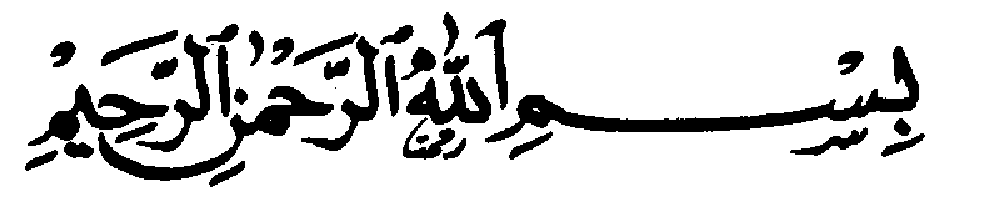
**BAITUL QIRADH**

**GALA MUAMALAH**

**SK Menteri Koperasi UKM Nomor : 014545/BH/M.KUM.2/VIII/2019Tgl : 22 Agustus 2019**

**Akta Nomor : 3 Tanggal 2 Agustus 2019 oleh Notaris KARNAINI, SH., Sp. N**

**Jl. Krueng Beukah, Komplek Masjid Baitul Ghaffur - Blangpidie, e-mail:** [***bq.galamuamalah@gmail.com***](mailto:bq.galamuamalah@gmail.com)

****

**Akad Pembiayaan Mudharabah (Kerjasama Bagi Hasil)**

Nomor Akad : PM. ${nomor\_surat} / BQGM / ${bulan\_romawi} / ${tahun}

*”Asyhadu Anlaa Ilaaha Illa Allah, Wa asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah”*

*“Hai orang – orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”*

*(QS. An Nisa’ (4) ; 29)*

*“… Dan Allah telah menghalalkan jual – beli dan mengharamkan riba”*

*(QS. Al Baqoroh (2) : 275)*

*“ Hai orang yang beriman ! Penuhilah akad-akad itu …”*

*( QS. Al Maidah (5) : 1).*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pada Hari ini ${date\_today}, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Salman Syarif, S.P

Jabatan : Manager Unit

Alamat : Desa Durian Rampak, Kecamatan Susoh, Kabupaten Abdya

1. Nama : M. Hasan, ST

Jabatan : Kabag. Pembiayaan

Alamat : Desa Pante Geulumpang, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Abdya

Masing-masing bertindak untuk dan atas nama KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalh berdasarkan Surat Kuasa Pengurus Nomor : SK. NO. 001 / KSPPS.BQGM / KP-PP / XII / 2020 tanggal 01 Desember 2020 Untuk selanjutnya disebut “Pihak Pertama” atau Shohibul maal (Pemberi Pembiayaan).

1. Nama : ${nama\_nasabah}

Tempat/tgl lahir : ${tl\_nasabah}/${tgl\_nasabah}

No.KTP/SIM : ${nik\_nasabah}

Alamat : ${alamat\_nasabah}

Dalam melakukan perbuatan hukum disetujui oleh Istri/Suami/Anak :

Nama : ${nama\_pasangan}

Tempat/tgl. lahir : ${tl\_pasangan}/${tgl\_pasangan}

NoKTP/SIM : ${nik\_pasangan}

Alamat : ${alamat\_pasangan}

Dalam hal ini bertindak dan atas nama pribadi / diri sendiri, yang selanjutnya disebut “ Pihak Kedua “ atau Mudharib (Pelaku usaha).

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya, Pihak Kedua memerlukan sejumlah dana, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pihak Kedua telah mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama untuk menyediakan pembiayaannya, yang dari pendapatan / keuntungan usaha tersebut akan dibagi antara Pihak Kedua dan Pihak Pertama.
2. Bahwa terhadap permohonan Pihak Kedua tersebut, Pihak Pertama telah menyatakan persetujuannya, baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan Pihak Kedua maupun terhadap pembagian pendapatan / keuntungan yang disepakati.
3. Kedua belah pihak telah sepakat untuk bekerja sama dalam usaha tersebut, dimana Pihak Pertama memberikan modal pembiayaan kepada pihak Kedua.
4. Dalam hal satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam akad ini tidak berlaku dan / atau tidak sah dan / atau tidak boleh dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain dalam akad ini dan / atau akad sebelumnya, tetap berlaku sah dan boleh dilaksanakan dan tidak ada yang dikecualikan.

Dengan ini para pihak menyatakan setuju dan sepakat mengikatkan diri untuk melakukan akad Pembiayaan Mudharabah, selanjutnya disebut “Perjanjian” dengan syarat-syarat dan kondisi, serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

# PEMBIAYAAN MUDHARABAH

# Pasal 1

DEFINISI :

1. “Mudharabah” adalah akad atau sistem kerja sama dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua pihak sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang tidak ada kelalaian dari pihakpengelola.
2. “Pembiayaan” adalah penyediaan sejumlah dana oleh Pihak Pertama untuk dikelola Pihak Kedua dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat- syarat, kondisi dan ketentuan, serta nisbah yang disepakati oleh dan antara Pihak Pertama dan Pihakkedua.
3. “Syari’ah” adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As- sunnah dan mengatur segla hal yang mencakup bidang ibadah mahdloh dan ibadahMuamalah.
4. “Nisbah Bagi Hasil “ adalah bagian dari hasil pendapatan / keuntungan yang menjadi hak Pihak Kedua dan Pihak Pertama yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pihak Kedua dan Pihakpertama.
5. “Dokumen Agunan” adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama berdasarkan perjanjianini
6. “Masa ( Jangka Waktu ) Penggunaan Modal” adalah masa berlakunya perjanjian ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjianini.
7. “Hari Kerja Pihak Pertama” adalah Hari Kerja Pihak PertamaIndonesia
8. “Pendapatan” adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan nasabah dengan menggunakan modal yang disediakan Pihak Pertama sesuai dengan Perjanjianini.
9. “Keuntungan” adalah pendapatan sebagaimana yang dimaksud di atas dikurangi biaya-biaya sebelum dipotongpajak.
10. “Pembukuan pembiayaan” adalah pembukuan atas nama Pihak Kedua pada Pihak Pertama yang khusus mencatat seluruh transaksi Pihak Kedua sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat Pihak Kedua atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menuruthukum.
11. “Cidera Janji” adalah peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 Perjanjian ini yang menyebabkan Pihak Pertama dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum Jangka Waktu Perjanjian ini.

# PEMBIAYAAN DAN JANGKA WAKTU PENGGUNAANNYA

# Pasal 2

1. Pihak Pertama dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada Pihak Kedua secara kontan/~~bertahap~~ sesuai dengan permintaan Pihak Kedua yang semata-mata akan dipergunakan untuk keperluan usaha oleh Pihak Kedua.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian Pembiayaan** | **Jumlah** |
| a. | Pembiayaan diberikan | Rp. ${palfond},- |
| b. | Proyeksi hasil panen (\*kotor) | ${proyeksi} Kg |
| c. | Proyeksi harga gabah padi per kg setiap masa panen | Rp. ${harga\_gabah},- |
| d. | Proyeksi hasil panen (\*kotor) | Rp. ${bruto},- |
| e. | Proyeksi Keuntungan (Nisbah/bersih) rata-rata perpanen setelah dikurangi Kewajiban zakat /~~perbulan~~ oleh Pihak II (5%) jika sudah nisab dan Biaya Operasional | Rp. ${neto},- |
| f. | Nisbah Bagi Hasil   * 1. Pihak I : 20%   2. Pihak II : 80% | Rp. ${bqgm},-  Rp. ${net\_nasabah},- |
|  | Cara Pembayaran | Jatuh Tempo |
|  | Jangka Waktu | ${tenor} Kali Panen |
|  | Tanggal Setoran pertama | Sesuai masa panen pertama |
|  | Tanggal Setoran terakhir | Sesuai masa panen terakhir |

Perjanjian Pembiayaan ini kedua belah pihak sepakat diadakan dalam waktu ${tahun\_tenor} tahun atau setara dengan ${tenor} kali panen sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini, dan jatuh tempo pada tanggal **berdasarkan jadwal panen.**

1. Berakhirnya jangka waktu pembiayaan / jatuh tempo tidak dengan sendirinya, pembiayaan berakhir apabila Pihak Kedua sudah melunasi kewajiban dan / atau kewajiban-kewajibannya.
2. Biaya yang timbul dari akad pembiayan Mudharabah ini meliputi:
   1. Biaya administrasi 0% dari total pembiayaan : Rp. 0,00,-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| b. Simpanan Pokok | : Rp. | 100.000,00-, |
| c. Simpanan Wajib / Bulan | : Rp. | 10.000,00,- |
| d. Simpanan lain-lain | : Rp. | 0,00,- |
| e. Biaya Notaris | : Rp. | 0,00,- |
| f. DanaTabarru’ | :Rp. | 0,00,- |
| g. Materai | : Rp. | 0,00,- |
| **Jumlah total** | **: Rp.** | **110.000,00,-** |

# PENCAIRAN PEMBIAYAAN

# Pasal 3

Pihak Pertama dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan Pihak Kedua melakukan pencairan dana pembiayaan, untuk dikelola dan dipergunakan untuk pengembangan usaha Pihak Kedua. Setelah Pihak Kedua memenuhi seluruh prasyarat .

# NISBAH DAN BAGI HASIL

# Pasal 4

1. Pihak Kedua dan Pihak Pertama sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa nisbah Bagi Hasil adalah:
   1. 20 % dari pendapatan (revenue) untuk PihakPertama.
   2. 80 % dari pendapatan (revenue) untuk Pihak Kedua, dan / atau Nisbah tersebut berdasarkan Pendapatan Pembiayaan Anggota.
2. Bahwa Pelaksanaan Bagi Hasil akan dilakukan pada tiap-tiap setiap masa panen dan / atau pada tanggal pencairan pembiayaan bulan berikutnya setiap bulan sampai jangka waktu pembiayaan berakhir.

# PEMBAYARAN KEMBALI

# Pasal 5

1. Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada Pihak Pertama, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan / keuntungan yang menjadi hak Pihak Pertama sesuai dengan nisbah sebagaimana ditetapkan pada pasal 4 perjanjian ini, menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Setiap pembayaran kembali oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atas pembiayaan yang diberikan oleh Pihak Pertama dilakukan di kantor Pihak Pertama atau di tempat lain yang ditunjuk Pihak Pertama.
3. Apabila Pihak Kedua meninggal dunia dan didalam pembayaran kewajiban (pembayaran pokok dan bagi hasil ) termasuk kolektibilitas satu (lancar) maka sisa kewajiban akan dilunaskan oleh Ahli Waris Pihak Kedua.
4. Jika Pihak Kedua meninggal dunia dalam mengembalikan pokok dan bagi hasil tidak lancar, maka kewajiban yang belum terbayar tetap menjadi kewajiban Pihak Kedua (Ahli waris).
5. Manakala Pihak Kedua meninggal dunia dengan tidak wajar (bunuh diri), maka sisa kewajiban Pihak Kedua tetap menjadi tanggungan Pihak Kedua (Ahli waris).

**Pasal 6**

Pihak Kedua berhak dan berwenang menjalankan usahanya, memiliki kewenangan untuk menanda tangani akad ini dan seluruh dokumen yang bersangkutan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam akad ini. Selama berlangsungnya akad ini Pihak Kedua akan menjaga semua perizinan, lisensi, persetujuan dan sertifikat yang harus dimiliki untuk melaksanakan usahanya.

# CIDERA JANJI

# Pasal 8

Menyimpang dari ketentuan Perjanjian ini, Pihak Pertama berhak menuntut / menagih pembayaran dari Pihak Kedua dan / atau siapapun yang juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini, untuk dibayar secara lunas seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini :

1. Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam PASAL 2.
2. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang- barang yang dijadikan jaminan, dan / atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada PASAL 8 akad ini ternyata palsu, atau tidak benar isinya, dan / atau Pihak Kedua melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam PASAL dalam Akad ini.
3. Sebagian atau seluruh harta kekayaan Pihak Kedua disita oleh Pengadilan atau pihak yang berwajib.

# PELANGGARAN

# Pasal 9

Pihak Kedua dianggap telah melanggar syarat-syarat Perjanjian ini bila terbukti Pihak Kedua meakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut :

1. Menggunakan pembiayaan yang diberikan Pihak Pertama di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
2. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi dan / atau akuisisi dengan pihak lain.
3. Menolak dan / atau menghalang-halangi Pihak Pertama dalam melakukan pengawasan dan / atau pemeriksaan usaha yang dilakukan Pihak Kedua.

# PENYELESAIAN PERSELISIHAN

# Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam surat perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, mediasi, abitrase syari’ah, dan Pengadilan Agama.
2. Mengenai akad kerjasama dengan segala akibatnya dan pelaksanaannya, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Agama Kab. Aceh Barat Daya.

# PENGALIHAN KUASA PENGELOLAAN ATAS OBYEK USAHA

# Pasal 11

Pihak Pertama berhak menunjuk atau memilih pihak lain untuk mengelola obyek usaha (sawah) atas akad pembiayaan Mudharabah ini secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dan atau melalui pelelangan umum dihadapan pihak yang berwenang atau di bawah tangan, apabila pihak kedua setelah jatuh tempo tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana telah disepakati pada pasal 2.

# Pasal 12

Hasil usaha sawah yang dikelola oleh pihak lain yang ditunjuk tersebut, dipergunakan untuk melunasi hutang pihak kedua kepada pihak pertama sesuai perhitungan nisbah (bagi hasil) yang telah disepakati di awal akad perjanjian ini.

# KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

**Pasal 13**

1. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Pihak Kedua (mudharib / penerima pembiayaan ) kepada Pihak Pertama ( shohibul mal ) sehubungan pemberian pembiayaan ini diberikan dengan hak SUBTITUSI sehingga tidak dapat ditarik kembali / diakhiri baik oleh ketentuan undang-undang yang mengakhiri memberi kuasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 KUHP Perdata maupun oleh sebab apapun juga, dan kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian pembiayaan ini, tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut akad pembiayaan ini tidak akan dibuat.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam akad pembiayaan mudharabah ini akan diatur dalam surat-surat dan atau kertas-kertas lain yang merupakan kajian yang melekat dan dilampirkan pada serta tidak dapat dipisahkan dari akad pembiayaan mudlarabah ini, mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. Pihak kedua tidak berkeberatan jika pembiayaan ini dipakai untuk cassi untuk Pihak Pertama atas pembiayaan pihak pertama kepada pihak ketiga.

Ditandatangani di : Blangpidie

Pada Hari : sesuaikan kembali

Tanggal : ${tanggal\_cetak}

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

# M. HASAN, ST SALMAN SYARIF, SP ${ttd\_nasabah}

# Kabag. Pembiayaan Manager Unit Mudharib / Nasabah

# 

# Mendapat persetujuan istri

Mudharib/Nasabah,

# ${ttd\_pasangan}

# SAKSI – SAKSI PERJANJIAN

**............................... ................................**

# ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**PENULIS PERJANJIAN / AKAD**

Yang membuat daftar riwayat hidup ini:

Nama : Asmaul Husna

Tempat/Tanggal Lahir : Alue Padee, 01 Januari 1987

Alamat : Desa Alue Padee, Kec. Kuala Batee. Kab. Abdya

Telepon : 082362101344

Jenis Kelamin : Perempuan

Riwayat Pendidikan

* 1. SD : MIN Alue Padee
  2. SMP : MTSN Sikabu
  3. SMA : SMA Inshafuddin
  4. PerguruanTinggi : UIN
  5. Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Perbankan Islam

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya dan kepada yang berkepentingan harap maklum adanya.

Blangpidie, ${tanggal\_pj}

Penulis

**ASMAUL HUSNA**